



Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia



AKUNTABILITAS BERBASIS *METTĀ* DAN *KAMMA*

Suardi Tanasal, Fransiskus Randa, Suwandi Ng

Universitas Atma Jaya Makassar, Jl. Tanjung Alang No.23, Makassar 90224

Surel: suarditanz@gmail.com

Volume 10
Nomor 3
Halaman 448-467
Malang, Desember 2019
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
02 Oktober 2019
Tanggal Revisi:
13 November 2019
Tanggal Diterima:
31 Desember 2019

Kata kunci:

akuntabilitas,
kepercayaan,
kontrak sosial,
transparan



Abstrak: Akuntabilitas Berbasis *Mettā* dan *Kamma*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna akuntabilitas *Mettā* dan *Kamma* dalam perspektif ajaran Buddha. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi terhadap pengelola, rohaniwan, dan umat Vihara binaan Sangha Theravada Indonesia di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas *Mettā* dimaknai melalui gaya kepemimpinan menggunakan pendekatan hati dan pemberdayaan sebagai bentuk penyaluran cinta kasih. Sementara itu akuntabilitas *Kamma* dimaknai melalui kepercayaan dan ketaatan pada hukum *Kamma*. Kedua makna tersebut membuat pengelola berlaku transparan dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

Abstract: Accountability Based on *Mettā* and *Kamma*. This study aims to explore the meaning of *Mettā* and *Kamma*'s accountability from the perspective of Buddhism. This research uses phenomenological method to organizers, clergy, and followers of the Theravada Indonesian Sangha temples in Makassar City. The research shows that *Mettā* accountability is interpreted through a leadership style using a heart approach and empowerment as a form of channeling love. Meanwhile, *Kamma*'s accountability is understood through trust and obedience to the law of *Kamma*. Both meanings make the organizers transparent and obedient to the applicable regulations.

Mengutip ini sebagai: Tanasal, S., Randa, F., & Ng, Suwandi. (2019). Akuntabilitas Berbasis *Mettā* dan *Kamma*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 448-467. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.26>

Penelitian untuk mencari makna akuntabilitas telah banyak dilakukan. Makna akuntabilitas dari sejumlah penelitian sebelumnya masih dipahami berbeda antara satu aktor dengan aktor yang lain. Hal ini menunjukkan makna akuntabilitas masih tergolong abstrak. Maka, penelitian ini mencoba melakukan pemaknaan akuntabilitas dari sudut pandang ajaran Buddha yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang etika terkait ajaran Buddha yang dilakukan oleh Campergue (2015) dan

Kovács (2017) yang mengungkapkan bahwa delapan jalan mulia memiliki kaitan yang erat dengan etika. Delapan jalan mulia tersebut terdiri dari pengertian atau pandangan benar (*sammā ditthi*) dan pikiran benar (*sammā sankappa*) yang tergolong dalam kebijaksanaan. Selanjutnya, ucapan benar (*sammā vāca*), perbuatan benar (*sammā kammantā*), dan penghidupan benar (*sammā ājiva*) merupakan bagian dari kemoralan. Kemudian, usaha benar (*sammā vāyama*) atau biasa dikenal juga dengan daya upaya yang benar,

perhatian benar (*sammā sati*), dan konsentrasi benar (*sammā samādhi*) termasuk dalam konteks perkembangan mental. Konsep moralitas yang tertuang dalam jalan mulia berunsur delapan yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar dapat diterapkan dalam etika akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Siskawati, Ferdawati, & Surya (2016) menemukan tiga temuan yaitu nilai kejujuran yang dijunjung tinggi antara pengurus masjid dan masyarakat, akuntabilitas berperan sebagai alat dalam mencegah perpecahan atau perbedaan pandangan dalam Masjid, adanya sinergi antara pengurus, masyarakat Nagari dan perantau, dan kepercayaan sebagai makna akuntabilitas Masjid sebab pengelolaan masjid harus dilakukan secara terbuka, termasuk di antaranya kegiatan-kegiatan apa yang telah dijalankan dan yang akan dilaksanakan. Keterbukaan antara pengurus Masjid, donatur, dan Jamaah menjadi kunci solidnya suatu organisasi Masjid.

Penelitian terkait akuntabilitas pada Pura dilakukan oleh Paranoan & Totanan (2018). Penelitian tersebut dilakukan di Pura Giri Natha Makassar dengan menggunakan paradigma interpretif. Hasil penelitiannya menunjukkan penekanan yang lebih pada prinsip keikhlasan dan kepercayaan, di mana karma menjadi patokan utama setiap aktor dalam bertindak. Penelitian mengenai akuntabilitas dalam Gereja Katolik dilakukan oleh Randa (2019) mengenai rekonstruksi konsep akuntabilitas dalam Gereja Katolik dengan pendekatan inkulturasi dalam sebuah komunitas Gereja Katolik di Tana Toraja. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa terdapat tiga dimensi akuntabilitas dalam sebuah tubuh Gereja Katolik, yakni dimensi spiritual, dimensi kepemimpinan, dan dimensi keuangan. Dimensi spiritual berbicara mengenai bagaimana rasa bakti dari umat yang berasal dari kesadaran sendiri untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan spiritual beragama (dalam hal ini adalah segala kegiatan Ekaristik dan Sakramentalis Gereja). Dimensi kepemimpinan mengacu pada tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin komunitas tempat ibadah berdasarkan spiritualisme yang telah digariskan dalam agama. Dimensi keuangan, yang merupakan faktor kunci dalam praktik akuntabilitas sebuah tempat ibadah, mengacu pada kemampuan serta rasa tanggung jawab pengelola tempat ibadah untuk mengelola sistem keuangannya dengan ob-

jektif, sesuai dengan standar yang berlaku, dan menyajikan segala bentuk transaksi dalam laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses publik.

Kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Phra Dhammachayo, seorang kepala Vihara Wat Phra Dhammakaya di Thailand, sebesar 28 miliar Poundsterling menyebabkan pemerintah mewajibkan seluruh Vihara yang didirikan di Thailand agar segera melaporkan informasi keuangannya. Kasus tersebut menunjukkan krisis moral dan etika sedang melanda manusia di era global ini. Keserakahan manusia akan harta kekayaan ataupun keuntungan material menjadikan manusia seakan-akan lupa terhadap aturan dan norma-norma (etika) yang ada. Keserakahan tersebut pada akhirnya akan merugikan kepentingan umum bahkan dirinya sendiri. Untuk mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang tersebut diperlukan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan urgensi dari praktik akuntabilitas pada Vihara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dimiliki.

Penelitian akuntabilitas pada organisasi keagamaan Buddha di Indonesia khususnya tentang akuntabilitas terkait dengan ajaran Buddha masih sangat kurang. Padahal, Indonesia merupakan negara religius yang mengakui Buddha sebagai salah satu agama yang telah lama berkembang di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada penelitian Randa, Triyuwono, Ludigdo, & Sukoharsono (2011) dan Silva, Llewellyn, & Anderson-Gough (2017) yang merekonstruksi konsep akuntabilitas di sebuah gereja. Peneliti tertarik untuk melakukan studi yang serupa, tetapi penelitian ini dilakukan pada organisasi Vihara binaan Sangha Theravada Indonesia (STI) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan bentuk-bentuk akuntabilitas yang dibangun dalam organisasi keagamaan Buddha. Bentuk-bentuk akuntabilitas tersebut tidak terlepas dari ajaran-ajaran Buddha yang menjadi dasar tata kelola organisasi keagamaan dalam suatu Vihara. Oleh karena itu, dibutuhkan pemaknaan yang mendalam tentang bentuk-bentuk akuntabilitas yang dikhususkan kepada anggota dan pengelola Vihara yang menjalankan kegiatan di dalam ataupun di luar Vihara dengan baik dan sejalan dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan Buddha. Sang Buddha mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat keba-

Tabel 1. Daftar Nama Informan

Nama Informan	Jabatan
Bhikkhu Adhikusalo	Ketua Bhikkhu Daerah Pembinaan/ Padesanayaka Sulawesi Selatan
Bhikkhu Jayamedho	Ketua Yayasan dan Kepala Vihara Sasanadipa
Romo Bumi	Ketua <i>Karakasabha</i> (Penanggung Jawab Operasional Harian) Vihara Sasanadipa
Bhikkhu Appamatto Mahathera	Rohaniwan/Bhikkhu Sangha Theravada Indonesia
Romo Hemajayo	Rohaniwan/Romo/Pandita (Ketua Pengurus Daerah Magabudhi Sulawesi Selatan)
Tri	Umat
Jimmy	Umat

jikan, menghindari perbuatan buruk, serta menyucikan hati dan pikiran sehingga dapat merealisasikan *nibbana*, yang merupakan tujuan akhir umat Buddha. Ajaran Buddha tersebut menekankan pengembangan *metta* (cinta kasih) dan kepercayaan terhadap hukum *karma* (hukum sebab akibat).

Penelitian ini bertujuan memaknai akuntabilitas yang dipraktikkan dalam Vihara. Akuntabilitas dalam sebuah organisasi Vihara memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana organisasi itu bisa menyandang predikat akuntabel. Pengelolaan yang tidak dilaksanakan secara akuntabel, secara kasat mata bisa saja terlihat akuntabel, tetapi secara hakikatnya organisasi tersebut bisa dikatakan cacat nilai akuntabilitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap praktik akuntabilitas yang dilaksanakan oleh para pengelola Vihara sehingga dapat menjadi lebih akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan fenomenologi sebagai alat analisis. Fenomenologi mempertimbangkan kegiatan keseharian manusia untuk menangkap permasalahan sosial lalu menginterpretasikannya (Chabrak, Haslam, & Oakes, 2019; Lamprecht & Guetterman, 2019; Ziakas & Boukas, 2014). Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang tepat digunakan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan bentuk akhir temuan yang dihasilkan dari penelitian ini didasarkan pada kesadaran dan pengalaman subjek yang terlibat dalam praktik akuntabilitas yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai ajaran Buddha.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang digunakan yaitu informasi mengenai pengelolaan yang didapat dari wawancara mendalam dengan informan. Pertanyaan wawancara lebih mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur dengan tujuan agar data yang didapat lebih rinci, jujur, dan mendalam. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan aktivitas keagamaan yang berlangsung serta pengamatan simbol-simbol yang ada dalam Vihara.

Analisis data melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah data normatif diperoleh dari literatur dan beberapa penelitian terdahulu tentang pelayanan umat dalam Vihara Sasanadipa binaan Sangha Theravada Indonesia (STI). Selanjutnya, data tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk menemukan isu-isu penelitian. Langkah kedua adalah memilih data empiris dari hasil pengamatan pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas lebih lanjut. Dalam tahap ini akan ada data yang direduksi/dihilangkan dari hasil penelitian karena tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam menyajikan data secara sistematis sehingga mudah dipahami. Selain itu, pada langkah ini juga dilakukan pengolahan data dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap informan terpilih terkait pengelolaan Vihara Sasanadipa binaan Sangha Theravada Indonesia (STI). Dari semua langkah yang dilakukan, akan menghasilkan sebuah kerangka penelitian untuk

melanjutkan ke beberapa tahapan berikut, antara lain: pertama, peneliti akan mengkaji intensionalitas dengan mengintegrasikan *noema* dan *noesis* pada akuntabilitas Vihara Sasanadipa binaan Sangha Theravada Indonesia (STI). *Noemanya* terkait dengan objek yang dipersepsikan seperti catatan hasil wawancara, dan dokumen-dokumen terkait administrasi Vihara, sedangkan *noesisnya* merupakan pemahaman subjektif para informan melalui operasional organisasi (dalam proses pengelolaan Vihara) dan persepsi umat tentang akuntabilitas pengelolaan Vihara.

Tahap kedua yaitu *epoche*. Peneliti menggali data terhadap informan secara personal di lapangan dengan tujuan menemukan masalah dari individu informan yang terkait. Kemudian, tahap *eidetic reduction* yaitu peneliti menguraikan dan mengungkapkan realitas yang ditemukan dari tahapan *epoche* sebelumnya untuk mencari esensi atau realitas pada Vihara Sasanadipa binaan Sangha Theravada Indonesia (STI). Esensi yang akan diungkapkan adalah fenomena pemahaman tentang akuntabilitas pengelolaan Vihara.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan. Penelitian ini membagi informan dalam 3 kategori (lihat Tabel 1) yaitu pengelola (Bhikkhu Adhikusalo, Bhikkhu Jayamedho, dan Romo Bumi), Rohaniwan (Bhikkhu Appamatto Mahathera dan Romo Hemajayo), dan umat (Tri dan Jimmy). Pengelola yang dipilih sebagai informan merupakan individu yang memiliki jabatan strategis dan memiliki latar belakang dalam memimpin sejumlah organisasi. Rohaniwan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan tokoh yang menjadi panutan dalam melaksanakan ajaran Buddha bagi umat. Umat yang dipilih merupakan individu yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Vihara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas *mettā*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara ditemukan praktik akuntabilitas dalam Vihara sarat dengan nilai-nilai ajaran Buddha, yaitu *mettā* (cinta kasih). Cinta kasih yang disalurkan oleh umat Buddha tidak terbatas hanya pada manusia saja, melainkan kepada semua makhluk. *Mettā* dalam pandangan Buddhis bukan hanya perasaan persaudaraan keagamaan (seiman). Ketika cinta kasih itu diberikan berdasarkan pandangan

agama semata, orang-orang yang berbeda keyakinan atau kepercayaan tentu tidak dapat menerimanya. Oleh karena itu, cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha bertujuan untuk kebahagiaan serta kesejahteraan semua makhluk, baik itu yang mencintainya maupun memusuhinya, atau bahkan yang ingin membunuhnya sekalipun.

Cinta kasih yang perlu dipraktikkan oleh umat Buddha juga tidak memandang orang baik ataupun orang jahat, semua hendaknya dipancarkan dengan kadar yang sama. *Mettā* (cinta kasih) merupakan alat yang manjur untuk mengalahkan kemarahan, seperti yang disabdakan oleh Sang Buddha di *Mettā Sutta* dalam *Khuddakanikāya* 9, yang berbunyi:

“Makhluk hidup apa pun juga,
Yang lemah dan kuat tanpa kecuali,
Yang panjang atau besar,
Yang sedang, pendek, kecil atau gemuk.
Yang tampak atau tidak tampak,
Yang jauh atau pun dekat,
Yang telah lahir atau yang akan lahir,
Semoga semua makhluk berbahagia.
Jangan menipu orang lain,
Atau menghina siapa saja,
Jangan karena marah dan benci,
Mengharap orang lain celaka.
Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya,
Melindungi anaknya yang tunggal,
Demikianlah terhadap semua makhluk,
Dipancarkannya pikiran (kasih sayangnya) tanpa batas.
Kasih sayangnya ke segenap alam semesta,
Dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas,
Ke atas, ke bawah dan ke sekeliling,
Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan.
Selagi berdiri, berjalan atau duduk,
Atau berbaring, selagi tiada lelap,
Ia tekun mengembangkan kesadaran ini,
Yang dikatakan: Berdiam dalam Brahma.
Tidak berpegang pada pandangan

salah (tentang *attā* atau aku),
 Dengan Sila dan Penglihatan yang
 sempurna,
 Hingga bersih dari nafsu indera,
 Ia tak akan lahir dalam rahim
 mana pun juga.”

Penyaluran *mettā* (cinta kasih) diwujudkan melalui kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini pemimpin merupakan figur yang memiliki keterampilan teknis serta mampu menjadi panutan sehingga akan memotivasi bahkan mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama demi tercapainya tujuan organisasi. Sosok pemimpin dengan sifat bawaan sebagai *natural born leader* memiliki ciri khas tersendiri yang sudah dimiliki sejak lahir. Sifat pemimpin tersebut lebih khas dan unik atau dengan kata lain orang lain tidak dapat menirunya. Namun, segala kegiatan yang serba instan, modern, dan kompleks di era global seperti sekarang membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan.

Seorang pemimpin hendaknya memiliki kebijaksanaan ketika memimpin suatu organisasi. Hal ini didukung dengan khotbah Sang Buddha mengenai Dasa-Raja Dhamma dari Khuddaka Nikaya, kitab Jataka Pali V. 378 yang menjelaskan tentang sepuluh macam pedoman dan tolak ukur bagi seorang raja atau pemimpin. Kesepuluh kriteria yang dijelaskan oleh Sang Buddha, mencakup kemurahan hati (*dana*), melaksanakan sila atau bermoral (*sila*), rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama (*pariccaga*), hati yang tulus (*ajjava*), bersopan santun (*maddava*), hidup sederhana (*tapa*), bersahabat dan menghindari permusuhan (*akkodha*), menjauhi kekerasan (*avihimsa*), sabar dan rendah hati (*khanti*), serta mendukung kebenaran (*avirodhana*).

Bhikkhu Jayamedho yang merupakan praktisi ajaran Buddha menekankan pentingnya cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan pada kutipan sebagai berikut.

“Jadi menggunakan pendekatan hati...bagaimana supaya orang itu senang di organisasi, suka di organisasi, mau mengabdikan... waktunya...tenaga, pikirannya untuk kemajuan bersama. Jadi un-

surnya memang beda, yang satu adalah unsur mencari nafkah, kalau di sini adalah menanam kebaikan dan kebajikan. Itu, seperti itu. Jadi di sini adalah menanam kebaikan dan kebajikan di sana adalah mencari duit untuk menghidupi keluarganya. Nah, kalau saya di sini tidak membayar upah dan jaminan sosial yang cukup, dia akan berhenti. Nah, di sinilah memang kan *gak* dibayar. Jadi dibayarnya melalui apa? Melalui pendekatan hati...” (Bhikkhu Jayamedho).

Pernyataan Bhikkhu Jayamedho menunjukkan adanya *noema* bahwa seorang pemimpin sepatutnya dapat memberikan teladan bagi setiap anggotanya. Lennerfors (2015), Scherer & Waistell (2018), dan Sung (2014) menyatakan ajaran Buddha bertujuan untuk menciptakan harmoni dengan cara mempersatukan berbagai kepentingan. Di sisi lain juga perlu menyentuh hati setiap anggotanya agar dapat sejalan dengan tujuan organisasi. *Noesis* dari Bhikkhu Jayamedho menunjukkan bahwa pendekatan hati yang dilakukan oleh pengelola disalurkan dengan penuh rasa cinta kasih (*mettā*) terhadap siapa pun juga.

Pada sisi lainnya, Romo Bumi juga turut memberikan pendapat terkait aspek kepemimpinan. Beliau menyampaikannya pada kutipan sebagai berikut.

“Ya, tugas yang paling berat sebenarnya, bagaimana menjadi perekat dari berbagai macam individu yang sifatnya berbeda-beda sehingga mereka mau punya satu visi” (Romo Bumi).

Hal ini menunjukkan *noema* dari Romo Bumi bahwa ketua dapat memberikan teladan bagi anggotanya, di mana seorang pemimpin juga dituntut agar dapat menjadi pemersatu di antara berbagai macam kepentingan dalam organisasi. Penyelarasan tujuan tersebut yang nantinya dapat membuat setiap anggota menjadi betah bekerja bersama dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Lalu peneliti bertanya kembali kepada Romo Bumi terkait visi Vihara. Romo Bumi menyatakan bahwa Vihara perlu memiliki

visi agar dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada umat agar dapat mempraktikkan ajaran dengan baik (*noema*). Berikut kutipan pernyataan dari Romo Bumi.

“Visinya yaitu bisa sama-sama membangun Vihara, menjalankan organisasi Vihara ini sehingga Vihara nanti bisa berkembang dan bisa melayani kebutuhan umat dengan lebih baik...ya kalau misi *karakasabha* sebenarnya adalah membuat Vihara itu menjadi tempat yang nyaman bagi umat untuk belajar Dhamma, sehingga ketika mereka mendapat tempat yang nyaman untuk belajar Dhamma, otomatis Buddha sasana suatu waktu akan bertahan lebih lama” (Romo Bumi).

Pernyataan Romo Bumi menunjukkan suatu *noesis* bahwa suatu Vihara yang baik akan selalu memperhatikan visi dan misinya agar senantiasa berjalan pada jalurnya. Namun koordinasi yang baik juga dibutuhkan guna memudahkan aktivitas dari Vihara. Namun, apa pun hasil yang telah dicapai oleh Vihara nantinya perlu untuk dipertanggungjawabkan baik kepada umatnya maupun masyarakat luas.

Eidetic reduction yang peneliti abstraksi setelah berdiskusi dengan Bhikkhu Jayamedho dan Romo Bumi yaitu bahwa kepemimpinan yang ada dalam Vihara telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Walaupun kepala Viharanya tidak menetap di kota Makassar, tidak menghalangi aktivitas ataupun komunikasi dalam rangka menjalankan visi dan misi Vihara sebagai wadah untuk melayani umat Buddha. Hal ini tercermin dari figur Bhikkhu Jayamedho yang disegani karena memiliki segudang pengalaman dan menggunakan pendekatan hati yang berorientasi kemanusiaan dengan penuh rasa cinta kasih dalam memimpin organisasi. Rahman, Sahad, & Abdullah (2013) dan Swierczek & Jousse (2014) meneliti mengenai jalan mulia berunsur delapan khususnya pandangan benar menyatakan bahwa ajaran Buddha sarat akan nilai-nilai cinta kasih dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan.

Pemberdayaan merupakan bentuk cinta kasih yang bertujuan untuk meningkatkan nilai diri dari manusia. Ketika manusia

telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, tentunya perlu juga ditanamkan rasa cinta kasih dalam dirinya. Hal ini sejalan dengan ajaran Buddha pada *Mangala Sutta* dalam *Khuddaka Nikaya*, sebagai berikut.

“*Bāhusaccaṇca sippaṇca, Vinayo ca susikkhito
Subhāsītā ca yā vācā, Etammagalamuttama*”.

“Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila
Dan bertutur kata dengan baik,
itulah berkah utama”.

Terkait pengetahuan, Bhikkhu Jayamedho turut berpendapat. Beliau bercerita mengenai aspek pengetahuan yang dilakukan dalam pengelolaan Vihara, seperti pada kutipan sebagai berikut.

“Misalnya *Pabbajja Samanera, Pabbajja Atthasilani*. Kemudian di samping itu juga, seperti di sini ada juga Kursus Agama Buddha tingkat dasar, menengah, dan sebagainya. Itu ada, semua ada pelatihan-pelatihannya. Kalau diperlukan untuk *leadership* program juga ada dibikinkan. Kemudian di Surabaya kemarin ada dibikin *Ranger Youth Programme*, program anak muda. Jadi waktu anak muda liburan, Vihara mau bisa bantu apa untuk membangun spiritualitasnya, mengenai *leadership*-nya, kebangsaannya, Vihara itu punya tanggung jawab juga. Waktu liburan sekolah itu loh. Juga pengadaan buku-buku pendidikan dan sebagainya untuk membantu sekolah-sekolah yang akan melaksanakan pelajaran agama Buddhanya itu” (Bhikkhu Jayamedho).

Pernyataan Bhikkhu Jayamedho menunjukkan *noema* bahwa tujuan diselenggarakannya pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan umat. Pengelola Vihara sadar akan pentingnya meningkatkan kualitas umatnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi teladan

dalam masyarakat (*noesis*). Pemberdayaan yang dilakukan sebisa mungkin menyentuh semua kalangan tanpa terkecuali.

Pemberdayaan yang dilakukan tentu saja membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Selain pengelola, rohaniwan juga berperan dalam melakukan pemberdayaan terhadap umat. Rohaniwan terutama *bhikkhu* tidak terlibat dalam urusan materil, melainkan lebih mengarah pada penciptaan nilai spiritual sebagai penuntun umat awam (Constable & Kuasirikun, 2018; Stirling, 2014). Selain itu, peneliti juga bertanya kepada Romo Hemajayo dan Bhikkhu Adhikusalo Mahathera dan dijawab melalui kutipan berikut ini.

“Ya Vihara sering melakukan pelatihan-pelatihan, seperti kalau dari...eee...mereka bekerja sama dengan Magabudhi maka bisa mereka buat program yaitu bagaimana supaya orang bisa paham dengan agama Buddha sehingga mereka nanti bisa di *visuddha visuddhi* menjadi upasaka. Nah namanya Kursus Dasar Buddha Dhamma. Mereka juga bisa bekerja sama dengan Magabudhi untuk melakukan KDD atau Kursus Dhammaduta. Jadi, Kursus Dhammaduta itu diadakan sebenarnya kepentingannya adalah bagaimana memberdayakan sumber-sumber daya manusia untuk menjadi Dhammaduta, yang tentunya kalau mereka sudah menjadi Dhammaduta mereka akan mengabdikan ke Vihara-Vihara. Selain itu di Vihara sendiri mungkin ada yang namanya *Dhamma* class yang diberikan kepada pemula-pemula agar mereka bisa paham apa sesungguhnya ajaran Sang Buddha itu sendiri. Kemudian tentu ada juga pelatihan-pelatihan yang kerja sama dengan Wandani, bagaimana agar bisa meningkatkan sumber daya ibu-ibu. Kemudian ada juga pelatihan untuk pemuda seperti *leadership* dan lain-lain segalanya. Kalau pemuda tentu mereka kerja sama dengan Patria atau Pemuda Theravada Indonesia. Kalau tadi ibu-

ibu namanya Wandani atau Wanita Theravada Indonesia” (Romo Hemajayo).

“Sementara ini yang asuhan itu ada, yaitu murid asuh. Jadi, *ka-yak* murid-murid yang Buddhis itu yang dikasih beasiswa. Kalau yang seperti ini yang anak-anak ini masih belum karena yang mengurus (sambil menunjuk beberapa anak-anak asuh di area Vihara) masih kekurangan. Ini kerja sama juga dengan lembaga yang lain, organisasi Buddhis yang lain” (Bhikkhu Adhikusalo).

Para rohaniwan baik romo maupun *bhikkhu* umumnya terlibat dalam suatu organisasi. *Noesis* dari Romo Hemajayo dan Bhikkhu Adhikusalo ialah organisasi merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas diri serta melakukan pemberdayaan terhadap umat. Vihara senantiasa mencari jalan untuk menyalurkan dana yang diberikan oleh umat. Oleh karena itu, Vihara selalu aktif dalam melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Vihara juga dilakukan kepada kalangan kurang mampu yang memiliki niat untuk mengembangkan diri. Wujud pemberdayaan yang diberikan oleh Vihara dapat melalui pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dari umat.

Umat mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Vihara. Dukungan yang diberikan oleh umat ada yang berupa materi (Constable & Kuasirikun, 2018; Montenegro, 2017), ada juga yang mendukung melalui keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Manfaat kegiatan pemberdayaan dirasakan langsung oleh umat sehingga mendorong umat untuk mendukung kegiatan serupa di masa depan. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang umat bernama Tri pada pernyataan sebagai berikut.

“Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lain itu misalkan hari Rabu itu biasanya ada meditasi umum (yang dipimpin) oleh pak Harry Hamzah selaku pembimbing untuk meditasi, dan untuk hari Kamis itu biasa ada *dhamma* class,

itu adalah pengulangan sutta-sutta dari Sang Buddha sendiri. Itu kegiatan-kegiatan (yang rutin dilakukan) di Vihara ini kalau pun ada kegiatan lain ini di luar jadwal tersebut” (Tri).

Pemberdayaan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya umat di masa sekarang ataupun masa mendatang (*eidetic reduction*). Pengelola Vihara menyadari hal ini dengan tidak hanya memperhatikan pembangunan Vihara secara fisik, tetapi juga memperhatikan sumber daya manusianya. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Vihara membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, di mana rohaniwan memegang peranan penting dalam melakukan pemberdayaan. Manfaat kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Vihara telah dirasakan langsung oleh umat.

Pengelola Vihara memiliki visi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini karena adanya rasa keprihatinan akan masih adanya masyarakat yang belum memiliki akses untuk mengembangkan diri. Pemberdayaan dilakukan sebagai wujud penyaluran cinta kasih terhadap sesama sebagai praktik dalam melaksanakan ajaran Buddha.

Motivasi seseorang ketika ingin melakukan sesuatu perbuatan hendaknya dilandasi oleh niat yang baik. Niat yang baik dapat berupa ketulusan yang dilandasi cinta kasih dalam melakukan perbuatan baik. Bila motivasi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak baik, maka akan menimbulkan hasil yang tidak diharapkan. Hal ini didukung oleh Romo Hemajayo dan Romo Bumi pada kutipan berikut ini.

“Sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa motto daripada Magabudhi itu adalah tulus mengabdikan tiada henti. Jadi, kami itu mengabdikan sebenarnya tidak mengharap imbalan karena tujuan kami memberikan pengabdian itu adalah menjalankan sebuah misi agar umat-umat Buddha itu bisa paham dengan apa sebenarnya ajaran yang mereka yakini” (Romo Hemajayo).

“Jadi Vihara adalah milik bersama, kemudian ketika memang kepengurusan bisa berjalan dengan baik, itu hanya karena me-

reka seharusnya memang punya rasa memiliki. Kalau mereka *ndak* punya rasa memiliki, sangat susah membuat mereka melakukan apa yang kita mau. Kenapa? Karena mereka tidak digaji” (Romo Bumi)

Pernyataan Romo Hemajayo dan Romo Bumi menunjukkan suatu *noema* bahwa Vihara dapat mempertahankan eksistensinya berkat adanya sinergi antara pengelola Vihara dan umat. Baik pengelola maupun umat sama-sama memiliki peran yang penting dalam berkontribusi untuk kemajuan Vihara. Pengelola sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pada Vihara tentunya akan dihadapkan pada keputusan untuk melakukan pengorbanan. Hal ini juga diungkapkan oleh Tri terkait pentingnya kerja sama dan pengorbanan pada kutipan berikut ini.

“Tetapi kita berdana ini...berdana ini benar-benar tulus untuk berdana untuk pengembangan Vihara, *yah* untuk pembangunan Vihara, untuk pengelolaan Vihara, untuk manajemen Vihara dan sebagainya begitu” (Tri).

Pernyataan Tri menunjukkan adanya suatu *noema* bahwa pengorbanan bukan hanya dilakukan oleh pengelola Vihara saja, tetapi umat pun akan dihadapkan pada situasi di mana mereka harus berkorban (*noesis*). Hyndman & McConville (2018), O’Leary (2017), dan Paranoan & Totanan (2018) menyatakan praktik akuntabilitas tidak selamanya harus terkait dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga memperhatikan prinsip keikhlasan dan kepercayaan pada pengelolaan dalam organisasi. Ketulusan berupa pengorbanan yang dilakukan oleh umat dapat berupa materil ataupun moril sebagai wujud cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Apabila umat tidak melakukan pengorbanan secara tulus, hubungan yang dibangun antara umat dan Vihara tidak berlangsung lama.

Pengelola menyadari bahwa salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap ajaran Buddha yaitu mengabdikan secara tulus. Umat pun perlu memberikan dukungan secara tulus demi perkembangan Vihara sebagai wujud rasa hormat terhadap ajaran Buddha. Maka, dalam memberikan

pelayanan harus dilakukan secara tulus bukan karena kedudukannya melainkan berdasarkan perilaku dan kebijaksanaannya.

Eidetic reduction yang peneliti tangkap ialah pengabdian yang dilakukan oleh pengelola merupakan wujud dari praktik akuntabilitas yang mereka pahami. Pengelola melakukan pengabdian dengan ketulusan sebagai bentuk wujud cinta kasih yang tidak mengharapkan imbalan dari pelayanan yang mereka lakukan (Kovacs, 2014). Pengelola menganggap tugas dan tanggung jawab yang diemban merupakan panggilan jiwa dalam berbakti terhadap ajaran Buddha sebagai wujud penghormatan.

Pelayanan yang dilakukan oleh pengelola secara tulus juga perlu dilandasi oleh semangat untuk melayani. Semangat dalam ajaran Buddha lebih dikenal dengan istilah *viriyā*. Semangat dalam memperbaiki diri diperlukan untuk terus maju. Hal ini didukung oleh pernyataan Bhikkhu Jayamedho pada kutipan berikut ini.

“*Nah ini setapak demi setapak, tidak kalah pentingnya melakukan pembelajaran, bagaimana berorganisasi yang secara baik dan bertanggung jawab itu...accountable itu. Tapi itu kan pelan-pelan, karena itu kan warnanya macam-macam kan*” (Bhikkhu Jayamedho).

Pernyataan Bhikkhu Jayamedho menunjukkan suatu *noema* bahwa ketika seseorang malas atau tidak memiliki semangat. Hal ini akan membuat mereka seperti jalan di tempat atau dengan kata lain tidak mengalami perkembangan. Pernyataan tersebut juga menunjukkan suatu *noesis* bahwa semangat diperlukan dalam melakukan inovasi dalam organisasi karena perubahan yang dilakukan tentu memerlukan tenaga dan waktu. Peningkatan pelayanan harus disertai dengan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak (Kovács, 2014; Padmasiri, 2016). Pernyataan ini didukung oleh argumentasi Romo Bumi pada kutipan sebagai berikut.

“*Nah yang baru mungkin adalah bagaimana kita menunjukkan perhatian kepada umat yang baru ataupun yang lama dalam bentuk menyediakan mereka makan*

siang setelah puja bakti hari Minggu. Itu masih baru, dan ke depan mungkin saya juga berencana kalau tenaga dan kondisi kita mendukung, kita akan melakukan antar jemput buat anak-anak sekolah minggu yang orang tuanya tidak sempat mengantarkan mereka ke Vihara pada hari Minggu” (Romo Bumi).

Pernyataan Romo Bumi menunjukkan suatu *noesis* bahwa pengurus Vihara telah melakukan sejumlah inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada umat. Hal ini dikarenakan umat akan selalu menuntut peningkatan pelayanan dari Vihara. Ketika Vihara tidak melakukan inovasi, dapat dipastikan Vihara tersebut tidak akan berkembang dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh umatnya. Peneliti juga menanyakan pandangan dari Jimmy terkait dengan pelayanan yang telah dilakukan oleh Vihara dan dijawab pada kutipan berikut ini.

“*Terus kalau untuk saya pribadi terus terang untuk Sasanadipa sendiri saya cukup puas. Apalagi semakin bertambah ke sini saya melihat yaitu Sasanadipa memperbaiki pelayanan mereka dan menjadi lebih baik menurut saya. Seperti sekarang itu ada tambahan setelah selesai umat berapa... umat melakukan puja bakti (biasanya) dari Vihara ada pihak mereka itu mempersilahkan kepada umat yang ingin menyediakan dana makanan. Dana makan itu nanti ditunjukan untuk umat-umat yang sudah melakukan puja bakti. Jadi menurutku itu ada satu hal yang positif di mana umat diberi kesempatan untuk berdana dan ada juga umat yang diberi kesempatan untuk menerima dana itu*” (Jimmy).

Pernyataan Jimmy menunjukkan *noesis* bahwa semangat dalam berinovasi merupakan daya tarik yang baik untuk meningkatkan jumlah umat suatu Vihara. Semangat dalam melakukan inovasi dapat menjadi pembeda dari satu Vihara dengan Vihara lainnya maupun dengan tempat iba-

dah lainnya. Umat tentu akan memilih tempat ibadah yang dapat memberikan pelayanan terbaik dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritualnya.

Eidetic reduction yang peneliti simpulkan yaitu pengelola Vihara sadar akan pentingnya *virīya* (semangat) dalam melakukan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan, di mana inovasi tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan memerlukan waktu untuk merealisasikannya. Kemudian, umat telah merasakan adanya perubahan berupa peningkatan pelayanan dari tahun-tahun sebelumnya. Semangat tersebut ditunjukkan dalam kehadiran umat dalam setiap kegiatan peribadatan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pengelola. Semangat yang ditunjukkan oleh umat ataupun pengelola merupakan wujud dari penghormatan terhadap ajaran Buddha.

Akuntabilitas kamma. Pada ajaran Buddha Sang Buddha menetapkan larangan dan perintah dengan tujuan untuk memproteksi para praktisi agar terhindar dari belenggu penderitaan. Apabila melanggarnya, para praktisi itu sendiri yang akan menanggung penderitaan tersebut, bukan orang lain. Tidak ada yang dapat menanggung akibatnya selain diri sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang memahami mengenai hukum karma akan menumbuhkan rasa malu (*hiri*) dan takut (*ottapa*) untuk melakukan kesalahan atau berbuat jahat. Sebaliknya, apabila praktisi melakukan perbuatan yang baik, hasil yang diperoleh tentu bagi dirinya sendiri, sehingga tidak ada pemberi pahala atas perbuatan baik yang telah dilakukan. Pernyataan ini diperjelas di Samuddaka Sutta dalam Samyutta Nikaya 11.10, yang berbunyi:

“Yādisam vapate bijam, tādisam harate phalam; Kalyānakāri kalyānam, pāpakāri ca pāpakam; Pavuttam tāta te bijam, phalam pacca nubhos sasi’ti “.

“Apapun benih yang ditanam, Itulah buah yang akan dipetik: Pelaku kebaikan memetik kebaikan; Pelaku kejahatan memetik kejahatan. Olehmu, teman, benih telah ditanam; Dengan demikian engkau akan mengalami buahnya”.

Prinsip inti agama Buddha mengacu pada hukum karma (Daniels, 2014; Huang, Lu, & Luo, 2016; Kraisornsuthasinee, 2012). Hal ini didukung oleh percakapan dari Bhikkhu Adhikusalo yang menyatakan:

“Ya...sebenarnya kalau kita menjadi Buddhis dan memahami betul Dhamma, khususnya hukum *kamma*, maka kita akan melihat perumpamaan seperti kalau *nanam* padi, kalau padinya sudah tumbuh akan memetik padi. *Nanam* jagung, nanti kalau jagungnya sudah berbuah akan panen jagung. Demikian juga kalau kita melakukan perbuatan buruk, akan berdampak (menghasilkan) keburukan. Kalau berbuat baik akan (menghasilkan) kebahagiaan. Sama juga kalau di dalam organisasi, kita melakukan hal-hal yang buruk, nanti kinerja kita juga buruk. Tapi kalau kita betul-betul sadar bahwa dengan berbuat baik di dalam organisasi, tentu akan membuahkan kesuksesan, kesejahteraan di dalam organisasi sebagai wujud dari kebaikan kita di dalam organisasi” (Bhikkhu Adhikusalo).

Pernyataan Bhikkhu Adhikusalo memunculkan suatu *noesis* bahwa hukum karma dipahami sebagai hukum sebab akibat yang akan selalu mengikuti pelakunya, yaitu kebaikan akan membuahkan kebaikan, keburukan akan menghasilkan keburukan pula. Hukum karma menjelaskan mengenai adanya akibat dari perbuatan baik maupun buruk. Maka, dalam mengelola Vihara, pengelola perlu untuk bertindak secara transparan terhadap umat dan pihak terkait. Transparansi menjadikan kinerja pengelola lebih mudah untuk dipantau, sehingga bila mereka berkinerja baik akan mendapat pujian, sedangkan apabila berkinerja buruk akan mendapat celaan.

Keterbukaan atau transparansi informasi tentunya harus disertai dengan perolehan arus informasi secara bebas dan memadai serta andal (*reliable*) sehingga mudah untuk dipahami dan dipantau. Transparansi merupakan hal yang penting dalam Vihara.

Suatu Vihara yang transparan akan dapat menumbuhkan kepercayaan dari berbagai pihak. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh karena tidak ada hal yang sengaja ditutup-tutupi atau dirahasiakan dari umat. Dalam hal ini, Vihara harus memberikan informasi secara terbuka baik ketika diminta maupun tidak diminta. Pernyataan ini didukung oleh Bhikkhu Jayamedho yaitu:

“Harus ditingkatkan...transparansi ya! Ini kan diketahui, mengenai tadi yang sudah dibicarakan mengenai rencana pertanggungjawaban dana yang sudah terkumpul sekian miliar kepada donatur. Nah kalau kita tidak melakukan transparansi mengenai penggunaan dana dan sebagainya, maka gak akan dipercaya. Jadi transparansi mengenai keuangan, terutama itu. Transparansi mengenai perizinan, ada *gak izin-izin* semua... untuk ini semua, yang mengenai kayak proses tanah dan sebagainya *gitu*. Jadi transparansi tidak hanya kepada pemerintah, kepada umat, tapi juga kepada pimpinan *Sangha*” (Bhikkhu Jayamedho).

Noesis yang dipahami oleh Bhikkhu Jayamedho ialah transparansi dalam pengelolaan Vihara bukan hanya terkait dengan aspek keuangan yang berhubungan dengan penggunaan dana dari donatur. Vihara juga perlu untuk memberikan pengungkapan mengenai perencanaan Vihara ke depannya. Selain itu, diperlukan juga transparansi dari aspek legalitas yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat luas serta pemerintah yang dapat mempengaruhi eksistensi sebuah Vihara.

Selain Bhikkhu Jayamedho, hal yang serupa juga diungkapkan oleh Romo Bumi. Beliau menekankan pentingnya transparansi pada pengelolaan Vihara. Penjelasan lebih lanjut dapat ditelaah pada kutipan sebagai berikut.

“Karena dari kepengurusan yang telah-telah lalu memang kami (merasa) cukup laporan yang telah kami berikan dengan memberikan laporan ditempel di dinding itu. Jadi siapa pun umat, apakah mereka menyumbang atau tidak, mereka tetap mendapatkan laporan

itu secara transparan” (Romo Bumi).

Pernyataan Romo Bumi menunjukkan suatu *noesis* bahwa pengurus Vihara telah berusaha untuk bertindak secara transparan terutama dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kepercayaan baik dari umat maupun donatur. Wujud dari keterbukaan pengurus Vihara adalah dengan cara membuat laporan terkait dengan dana yang telah diperoleh dan digunakannya melalui koordinasi dengan bendahara Vihara.

Peneliti juga bertanya mengenai transparansi dalam pengelolaan Vihara. Hal ini ditegaskan oleh Tri melalui kutipan berikut ini.

“Selain itu juga untuk pengelolaan Vihara itu sangat transparan karena umat bisa mengetahui pemasukan pengeluaran (Vihara). Itu dibuktikan dengan adanya bukti rekapan atau pengeluaran selama satu bulan (oleh pengurus Vihara) yang ditempel di mading begitu” (Tri).

Pernyataan Tri menunjukkan suatu *noesis* bahwa timbulnya kepercayaan dari umat tidak terlepas dari transparansi pengelolaan Vihara. Aspek yang paling sensitif dalam Vihara adalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Maka, beberapa umat ada yang ingin mengetahui penggunaan dana yang diberikan meskipun mereka tidak menuntutnya secara langsung. Namun, pengelola harus aktif melaporkan secara berkala aktivitas mereka.

Peneliti menanyakan tentang hambatan yang dirasakan dalam melaksanakan pengelolaan Vihara secara transparan. Hal ini dijelaskan oleh Bhikkhu Adhikusalo pada kutipan sebagai berikut.

“Mungkin sekitar 85 begitu... *ehmm..85%*. (Masalahnya) itu kita masih kendala di kesibukan, komunikasi kurang, jadi hal-hal untuk transparan itu masih kurang.. Jadi 15% itu karena kesibukan, kurang komunikasi *gitu...*” (Bhikkhu Adhikusalo).

Pernyataan Bhikkhu Adhikusalo menunjukkan adanya *noesis* pentingnya

transparansi, tetapi masih perlu untuk ditingkatkan. Transparansi dapat terhambat apabila aktivitas terlalu padat dan kurangnya komunikasi. Maka, komunikasi dan koordinasi perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan transparansi.

Pengelola Vihara senantiasa berlaku transparan untuk menghindari prasangka buruk dari berbagai pihak. Prasangka buruk yang timbul akan mengakibatkan seseorang memperoleh karma buruk. Timbulnya prasangka buruk juga akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam Vihara sehingga pengelola perlu berlaku transparan. Pengelola yang transparan merupakan wujud dari akuntabilitas yang berdasarkan pada ajaran Buddha terkait dengan hukum karma (*eidetic reduction*). Umat Buddha yang percaya akan hukum karma menganggap bahwa setiap perbuatan tentu akan menghasilkan akibat. Davis (2014) dan Rahman, Sahad, & Abdullah (2013) berargumentasi bahwa umat Buddha percaya bahwa untuk memperoleh keselamatan di dunia harus ditempuh dengan cara melaksanakan perbuatan baik sesuai dengan ajaran agama. Hal ini membuat umat Buddha tidak menuntut pertanggungjawaban secara langsung dari pengelola, tetapi karena kepercayaan sangat tinggi dari umat membuat pengelola perlu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada umat meski dalam bentuk tidak langsung.

Transparansi dibutuhkan untuk memperoleh kepercayaan, di mana manusia sebagai makhluk sosial pastinya akan terus berinteraksi dengan orang lain di sekelilingnya. Hubungan itu bisa dimulai dari skala paling kecil yakni hubungan antarmanusia di tingkat keluarga hingga hubungan dengan masyarakat luas. Tentunya setiap hubungan, entah itu dengan orang tua, saudara, rekan bisnis atau klien, dan sebagainya membutuhkan suatu landasan sebagai perekat, salah satunya dapat berupa kepercayaan. Hal ini diungkapkan oleh Tri sebagai seorang umat melalui kutipan berikut ini.

“Kalau di Vihara itu umat sangat percaya, sejauh yang saya lihat dan yang saya tau. Sangat percaya (dengan pengelolaan) pengurus Vihara, *karakasabha*, dengan yayasan” (Tri).

Noesis yang ditarik dari pernyataan umat bernama Tri ialah rasa saling per-

caya dalam sebuah organisasi sangat penting karena dapat menghindari perpecahan. Kepercayaan tidak bisa diperoleh secara instan, dibutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan rasa saling percaya. Namun, rasa saling percaya yang telah diperoleh dapat hilang dalam sekejap bila rasa saling curiga mulai muncul dalam organisasi. Maka, dapat melunturkan kepercayaan itu dan bahkan dapat mengakibatkan perpecahan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Jimmy dan Tri pada kutipan sebagai berikut.

“Kalau saya sendiri sebagai umat *sih*, saya *sih* percaya saja, maksudnya kalau tidak apa pun saya percaya bahwa (dana yang disumbangkan) itu dipakai untuk hal yang positif dan untuk yang berkaitan dengan Dhamma” (Jimmy).

“Ibaratnya gini kita berjalan pakai GPS, buat apa kita ikuti GPS kalau kita tidak percaya dengan GPS. Sama halnya dengan (buat apa) kita berdana kalau tidak percaya, pastinya orang berdana itu kan percaya. *Oh...* ini untuk pembangunan. *Oh..* untuk ini dan sebagainya” (Tri).

Ungkapan dari Jimmy dan Tri menunjukkan *noesis* adanya kepercayaan dalam hal pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus, *karakasabha*, dan yayasan. Umat memberikan kepercayaan kepada Vihara agar dapat menyalurkan dana yang diberikan untuk kegiatan yang bersifat positif. Wujud kepercayaan umat dapat dilihat dari adanya dana yang dipercayakan kepada Vihara, yaitu umat memandang Vihara sebagai sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, peranan pengurus Vihara sangat penting untuk memfasilitasi kebutuhan umat melaksanakan kebaikan.

Peneliti bertanya kepada Bhikku Adhikusalo terkait bagaimana pertanggungjawaban penggunaan dana dari donatur (*noema*), Beliau menguraikan pada pernyataan seperti berikut.

“Biasanya donatur itu sudah mempercayakan ke panitia sama *bhante*-nya yang memimpin dan membimbing pembangunan itu. Jadi setelah dana, kemudian untuk pembangunan donatur itu

bisa melihat bahwa dananya memang diperuntukkan sana, biasanya sudah percaya dan yakin” (Bhikku Adhikusalo).

Pernyataan Bhikku Adhikusalo menunjukkan bahwa kebanyakan umat tidak mempertanyakan mengenai penggunaan dana yang telah mereka berikan karena mereka telah memberikan kepercayaan sepenuhnya. Maka, pengelola perlu untuk menggunakan kepercayaan yang sudah diberikan sebaik-baiknya.

Pernyataan tersebut dikonfirmasi Jimmy sebagai perwakilan umat. Beliau menyatakan rasa percaya tersebut pada kutipan berikut ini.

“Saya tetap percaya saja, seperti alasan yang saya bilang tadi karena saya menganggap bahwasanya semua umat Buddha itu (pas-ti) menjalankan Pancasila dalam keseharian mereka dan mereka pasti juga ada yang namanya *hiri* dan *otappa* yaitu takut akan berbuat jahat dan takut akan hasil dari perbuatan jahat itu” (Jimmy).

Pernyataan Jimmy menunjukkan suatu *noesis* bahwa kepercayaan antarsesama belum cukup untuk membangun hubungan yang baik. Namun, umat Buddha pun perlu percaya tentang hukum karma sebagai hukum yang universal yang tidak dapat terelakkan. Kepercayaan akan hukum karma membuat umat tidak ragu akan tindakan yang dilakukan oleh pengelola karena ketika pengelola bertindak tidak benar, mereka akan menanggung akibat dari perbuatan mereka.

Eidetic reduction yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa umat menaruh rasa percaya yang sangat tinggi terhadap pengelola dengan tidak pernah mencurigai dan mempertanyakan keputusan ataupun tindakan dari pengelola. Wujud kepercayaan yang diberikan oleh umat terhadap pengelola adalah loyalitas umat dalam mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh pengelola Vihara. Kepercayaan yang diberikan oleh umat dibalas dengan komitmen dari pengelola Vihara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepercayaan akan hukum karma akan membuat seseorang lebih menjaga tindakannya, dalam hal ini moralitasnya. Burley (2014) dan Suman (2016) menemukan bahwa hukum karma merupakan penjelas yang rasional dalam meneguhkan moralitas. Pernyataan ini didukung oleh seorang rohaniwan bernama Bhikkhu Appamatto Mahathera, pada kutipan berikut ini.

“*Hmm...samma kammanta. Samma kammanta* itu perbuatan benar. Itu (dalam arti) orang-orang yang punya moralitas yang baik, sangat kelihatan jelas. Orang-orang yang punya moralitas otomatis adalah orang-orang yang bisa diandalkan. *Nah*, orang yang tidak mempunyai perbuatan benar adalah orang-orang (yang termasuk) sampah masyarakat, ya... yang bisa merusak” (Bhikkhu Appamatto Mahathera).

Pernyataan Bhikkhu Appamatto Mahathera menunjukkan *noema* bahwa orang yang menjaga moralitas akan memperoleh manfaat baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan selanjutnya. Manfaat yang diperoleh dalam kehidupan ini bagi orang yang menjaga moralitas akan mendapatkan kekayaan, reputasi yang baik, dan rasa percaya diri. Oleh karena banyaknya manfaat yang diperoleh dari seseorang yang menjaga kemoralan, maka Sang Buddha menganjurkan murid-muridnya untuk menjaga moralitas.

Pentingnya moralitas kembali ditekankan oleh Bhikkhu Jayamedho. Beliau menekankan bahwa setiap pengurus Vihara harus memiliki moralitas yang tinggi. Lebih lanjut, Bhikkhu Jayamedho mendeskripsikannya pada kutipan berikut ini.

“*Ehm...kembali...pengurusnya bermoral apa enggak? Kalau tidak bermoral, ya susah juga (dicegah). Kalau memang dia pengurusnya udah setuju karena memang lapar uang. Sudah dia punya cita-cita untuk membesarkan tempat ibadahnya, membesarkan ini duitnya gak ada...diiming-imingi, nih kasih duit. Ya kadang-kadang*

ya mau juga...daripada *gak* ada”
(Bhikkhu Jayamedho).

Pernyataan Bhikkhu Jayamedho menunjukkan *noesis* bahwa moralitas perlu dijaga oleh setiap pengelola Vihara agar dapat dipercayai umat. Dalam rangka memperoleh kepercayaan, pengelola perlu menjaga reputasinya, yang dapat pula mencerminkan reputasi Vihara yang dikelolanya. Hal ini juga disadari oleh pengelola Vihara untuk bekerja sama dengan orang yang senantiasa menjaga moralitas.

Peneliti juga menanyakan persepsi dari umat terkait dengan tingkah laku dari pengelola Vihara kepada umat. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Jimmy pada kutipan berikut ini.

“Karena semua itu pada dasarnya di dalam Vihara itu kan umat Buddha, di mana kita tahu bahwa pada dasarnya (umat Buddha) selalu menjalankan Pancasila dan salah satunya adalah yaitu sila ke empat yaitu bertekad untuk menghindari yang namanya berbohong” (Jimmy).

Pernyataan Jimmy menunjukkan adanya *noema* bahwa Sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Vihara, umat tentunya perlu mengenal pengelola Vihara tersebut. Persepsi terhadap pengelola Vihara akan muncul setelah terjadi interaksi antara umat dengan pengelola Vihara. Persepsi yang timbul dapat menjadi penentu apakah pengelola memiliki kredibilitas. Persepsi tersebut tampak dari tingkah laku ataupun moralitas pengelola (*noesis*).

Eidetic reduction yang ditangkap oleh peneliti adalah praktik moralitas yang dilakukan oleh pengelola Vihara dalam aspek moralitas adalah menghindari ucapan yang tidak benar atau ucapan bohong. Praktik moralitas memberikan arah yang jelas terkait dengan tindakan yang patut dan tidak patut untuk dilakukan. Briando & Purnomo (2019), Lamberton (2015), dan Rospitadewi & Efferin (2017) menyatakan moralitas diperlukan dalam menjaga etika dalam organisasi, di mana tujuan organisasi didasarkan pada tujuan bersama dan bukan tujuan pribadi. Kepentingan bersama dalam ajaran Buddha merujuk pada kebahagiaan semua makhluk (*sabbe sattā bhavantu sukhittā*). Maka, moralitas diperlukan dalam organisa-

si untuk menghindari konflik kepentingan antara pengelola dan umat.

Pengelolaan Vihara tidak terlepas dari pengambilan keputusan yang dapat menentukan masa depan dari organisasi. Apabila keputusan yang dipilih tidak tepat, maka akan merugikan organisasi. Terkadang keputusan yang diambil tidak melalui pertimbangan yang matang karena terdesak oleh waktu. Keputusan yang diambil secara cepat merupakan tindakan *responsive*. Namun, tetap harus dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan risiko-risiko di kemudian hari. Pernyataan ini didukung oleh ajaran Buddha dalam Dhammapada 2:4 yang berbunyi sebagai berikut.

*“Utthainavato satimato, Sucikamma
massa nisammakairino. Sannatassa
ca dhammajivino, Appamatassa
yaso bhivaoohati”.*

“Tabah dan penuh perhatian, suci dalam setiap perbuatan, hati-hati dalam setiap tingkah laku, mengendalikan diri dengan baik, dan hidup secara benar, maka orang yang selalu sadar ini akan maju dengan cepat”.

Kutipan ayat di atas juga didukung oleh pernyataan Romo Hemajayo. Beliau menekankan sikap menjaga hati dalam melakukan pengambilan keputusan. Penjelasan lengkap Romo Hemajayo dapat ditelaah pada kutipan berikut ini.

“Nah dengan demikian maka kita tentu akan mudah untuk mempunyai konsentrasi benar. Demikian pula sehingga akan muncul sati atau kewaspadaan yaitu dengan perhatian benar akan berkembang” (Romo Hemajayo).

Pernyataan Romo Hemajayo menunjukkan *noema* bahwa Sang Buddha mengajarkan para siswanya untuk selalu melatih konsentrasi. Konsentrasi yang baik akan memunculkan sikap waspada dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Kewaspadaan tidak hanya ditekankan untuk para rohaniwan tetapi juga pada umat awam dalam melatih moralitas.

Brummans, Hwang, & Cheong (2013) dan Thupten (2019) berargumentasi bahwa kesadaran diperlukan dalam menjaga

tindakan agar sesuai dengan nilai-nilai etika dan kemoralan. Hal ini didukung oleh pernyataan Bhikkhu Adhikusalo sebagai berikut.

“Ya...ya...perlu. Mungkin kalau Anda sebagai atasan, tidak hanya mudah percaya dengan omongan, laporan. Laporan (berupa omongan) ini bahwa sudah beres, tapi anda harus melihat apa yang dilaporkan secara tertulis atau menjadi yakin dengan melihat sendiri catatan atau laporan yang bisa Anda lihat begitu. Itu termasuk bagian dari *ehipassiko*. Jadi, tidak hanya percaya begitu saja, tapi harus betul-betul tau, melihat sendiri laporannya tertulis. Um-pama nanti Anda jadi bos, punya anak buah, bos laporannya sudah saya buat tertulis... Tapi masih di sana saja, Anda harus bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. *Nah* itu bagian dari *ehipassiko* itu” (Bhikkhu Adhikusalo).

Noesis yang dimaksud Bhikkhu Adhikusalo merupakan bentuk kehati-hatian yang diperlukan dalam mengelola Vihara. Kehati-hatian tersebut dapat berupa sikap tidak mudah percaya. Meskipun pengelola Vihara telah memiliki citra yang baik ataupun merupakan seorang rohaniwan, setiap pernyataan atau tindakan hendaknya selalu diverifikasi kebenarannya. Verifikasi diperlukan dalam rangka menghilangkan kecurigaan dan dapat meningkatkan rasa saling percaya.

Peneliti bertanya mengenai pandangan Bhikkhu Jayamedho terkait dengan cara mereka dalam menghadapi tantangan untuk meningkatkan pelayanan umat. Hal ini dijelaskan melalui sebagai berikut.

“*Anicca* yang dua-duanya menghadapi sosial, ekonomi, politik.. ya semua berubah, gak ada yang berhenti...teknologi juga jalan terus. Di dalam agama ya sama saja, sosial politik berubah terus, nasional maupun internasional. Global itu harus juga diperhatikan, baik dalam agama maupun non agama” (Bhikkhu Jayamedho).

Pernyataan Bhikkhu Jayamedho menunjukkan *noesis* bahwa pengelola Vihara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya perlu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut dapat berupa perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan Vihara tidak selalu berada dalam kondisi yang konstan, tetapi perubahan dapat terjadi secara dinamis. Pengelola Vihara perlu waspada terhadap ancaman yang mungkin ditimbulkan dari perubahan lingkungan, seperti pernyataan Bhikkhu Adhikusalo sebagai berikut.

“Kalau perhatian benar dikaitkan dengan organisasi. Kita sepenuhnya harus memperhatikan organisasi itu sehingga seperti di dalam meditasi kan mendapat pengetahuan, *nah* itu...pandangan terang. Sehingga mengetahui apa yang kita lakukan sehari-hari itu. Dan juga di dalam organisasi, mempunyai perhatian itu...fokusnya ke organisasi itu, sehingga mengetahui lingkup organisasi itu dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan organisasi dengan baik” (Bhikkhu Adhikusalo).

Pernyataan Bhikkhu Adhikusalo menunjukkan *noesis* bahwa perhatian yang diberikan oleh pengelola Vihara tidak hanya pada perubahan lingkungan eksternal, tetapi perhatian juga diperlukan dalam lingkungan internal Vihara. Lingkungan internal Vihara dapat mencakup perubahan sikap dan perilaku umat maupun anggotanya. Pengelola Vihara bahkan harus mengetahui aktivitas-aktivitas yang telah ataupun belum dilaksanakan secara rinci.

Bhikkhu Jayamedho juga menekankan kepercayaan terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan dalam Vihara. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan sebagai berikut.

“*Nah* sejauh ini mungkin ada memang yang belum dilaksanakan, yaitu apa...*auditing* (sambil tertawa). *Loh*...duitnya juga gak terlalu banyak juga ya...mungkin nantinya harus kalau diperlukan, nanti ya...ada *auditing*. Dengan *auditing*, maka donatur bisa lebih percaya gitu *loh*. Itu yang (be-

lum dilaksanakan), yang *auditing* itu. *Nah* memang untuk *auditing* itu ada duitnya, bayar ke auditor. *Ha...ha...ha... gitu loh* (sambil tertawa) sedangkan kita kan duitnya cuma berapa miliar sih, gak banyak. Kalau *bhante* di yayasan lain itu, duitnya bermiliar-miliar wah perlu auditing itu. *Nah* di sini kan duitnya, berapa masuk, berapa keluar, berapa masuk ya berapa keluar semua.. *gitu loh*" (Bhikkhu Jayamedho).

Noema dari pernyataan Bhikkhu Jayamedho ialah fungsi *check and balances* perlu dilakukan dalam pengelolaan Vihara untuk meningkatkan rasa saling percaya. Fungsi *check and balances* yang dilakukan dapat berupa penyampaian laporan terkait aktivitas Vihara. Selain penggunaan dana, kegiatan yang dilakukan juga harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut diverifikasi melalui audit yang merupakan bentuk verifikasi secara independen. Namun, audit belum dilakukan pada Vihara karena pertimbangan penggunaan biaya yang cukup besar.

Pengelola Vihara menyadari perlunya melakukan pertanggungjawaban secara transparan. Kinerja pengelola Vihara harus dapat dinilai secara objektif melalui proses verifikasi. Verifikasi dalam agama Buddha lebih dikenal dengan istilah *ehipassiko*. *Ehipassiko* adalah bentuk pembuktian yang mengajak seseorang untuk datang, melihat, dan membuktikan secara langsung. Hal serupa dikemukakan Lambertson (2015) dan Rospitadewi & Efferin (2017), yang menekankan pentingnya perilaku kebenaran terkait pengungkapan informasi yang transparan dalam pengelolaan organisasi. *Ehipassiko* sebagai bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh pengelola Vihara bertujuan untuk menghilangkan keraguan yang timbul baik antar sesama pengelola maupun pengelola dengan umat.

Eidetic reduction yang peneliti tangkap dari pernyataan narasumber yaitu keraguan terhadap perubahan lingkungan yang dinamis perlu disikapi dengan cara yang tepat. Keputusan yang diambil perlu dipertimbangkan secara matang dan hati-hati, meskipun terdesak oleh waktu. Keputusan yang diambil bila tidak melalui pertimbangan yang matang akan berakibat fatal dan dapat merusak reputasi serta kepercayaan baik dari

umat, masyarakat, maupun pemerintah.

Pengelola yang percaya akan adanya akibat dari suatu perbuatan tentunya akan berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa taat terhadap peraturan yang berlaku. Ketika seseorang telah memahami dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku tersebut, maka akan mengantarkan mereka pada kehidupan yang tenteram. Namun, hukum tersebut dilanggar akan mengakibatkan pelakunya mendapat hukuman. Hal ini diungkapkan dalam Dhammapada 185 yang berbunyi:

"Anupavādo anupaghāto; Pātimokkhe ca samvaro; Matannutā ca bhattasming; Pantanca sayanāsanang; Adhicitte ca āyogo; Etang Buddhana Sasanang".

"Tidak menghina, tidak menyakiti, dapat mengendalikan diri sesuai dengan peraturan, memiliki sikap madya dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi serta giat mengembangkan batin nan luhur; inilah Ajaran Para Buddha".

Ketaatan terhadap peraturan hukum juga didukung oleh pernyataan Romo Hemajayo. Beliau menjelaskan bahwa struktur pengelolaan Vihara di Indonesia juga berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Pernyataan lebih lengkap tersaji pada kutipan sebagai berikut.

"Nah cuma di Indonesia ada yang namanya Pandita, yaitu karena dibutuhkan oleh hukum. Seorang *Pabbajita* atau kita sebut sebagai bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneri, itu adalah orang yang meninggalkan kehidupan (sebagai) perumah tangga dan mereka itu terikat dengan vinaya atau aturan-aturan. Banyak (hal) tidak bisa mereka lakukan, sementara undang-undang harus ada yang menjalankan seperti upacara perkawinan. Upacara perkawinan ini tentu tidak bisa dipimpin oleh seorang *Pabbajita*, apakah dia bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneri. *Nah* sementara hukum itu mengatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila sudah sesuai dengan undang-un-

dang yang berlaku” (Romo Hemajayo).

Pernyataan Romo Hemajayo menunjukkan *noesis* bahwa hukum karma dalam agama Buddha adalah hukum yang berlaku universal dan perlu dipahami serta dipraktikkan. Namun, tidak kalah pentingnya juga hukum negara ataupun hukum adat. Hukum negara mengatur perilaku seseorang dalam bertindak pada wilayah yang dicakupnya, sedangkan hukum adat mengatur perilaku seseorang dalam bertindak pada golongan dan wilayah yang dicakupnya.

Pentingnya legalitas yang didapatkan ditegaskan oleh Bhikkhu Jayamedho. Beliau menekankan urgensi legalitas dalam aspek keberadaan Vihara. Pernyataan lebih lanjut ditunjukkan pada kutipan sebagai berikut.

“Kemudian itu ada di anggaran dasar yayasan, yang disahkan oleh menteri, dibuat oleh notaris. Didasarkan oleh menteri itu, diatur, didasarkan atas undang-undang. Kemudian kalau *karakasabha*-nya itu diangkat oleh pengurus, tidak usah di notariskan. Sebagai badan pengelola, kaki tangannya pengurus, itu di *karakasabha*, kalau dulu namanya *dayakasabha*” (Bhikkhu Jayamedho).

Pernyataan Bhikkhu Jayamedho menunjukkan suatu *noema* bahwa hukum negara hanya dapat mengikat pada wilayah yang dicakupnya, sehingga hukum dari satu negara dengan negara lain dapat berbeda. Hal ini pun berlaku di Indonesia dalam rangka memenuhi pelayanan terhadap umat Buddha, maka dibentuklah rohaniwan yaitu pandita. Selain mengikat seseorang, hukum negara juga mengatur mengenai legalitas suatu organisasi. Pernyataan ini juga menjadi *noesis* bahwa legalitas tersebut penting karena menunjukkan pengakuan sekaligus perlindungan dari pemerintah.

Terkait legalitas, Bhikkhu Jayamedho juga mengaitkan dengan organisasi Vihara. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan sebagai berikut.

“*Sangha* itu ada dua (badan hukum). Satu karena *Sangha* itu terdiri antara manusia-manusia, maka badan hukumnya dalam perkumpulan *Sangha Therava-*

da Indonesia, perkumpulan STI. *Emm...* kemudian perkumpulan ini, para bhikkhu *kan* terima dana-dana dari umat-umat. Nah ini, dikelola oleh Yayasan STI. Jadi kalau perkumpulan ini tunduk pada hukum perdata (BW), kemudian *kalo* kekayaannya dikelola oleh Yayasan STI tunduk pada undang-undang yayasan” (Bhikkhu Jayamedho).

Pernyataan Bhikkhu Jayamedho menunjukkan *noema* bahwa Vihara ataupun pengelolanya terikat oleh hukum yang berlaku. Hukum-hukum yang berlaku mengatur mulai dari pendirian Vihara, sumber dana, sampai pengelolaan Vihara tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan suatu *noesis* bahwa tanggung jawab pengelola Vihara tidak hanya sebatas pada umat atau donatur saja, melainkan juga kepada pemerintah yang selalu turut serta dalam mengawasi kegiatan yang diselenggarakan.

Pengelola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terikat oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Di sisi lain, pengelola dalam melaksanakan tugasnya juga membuat sejumlah peraturan dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketertiban. Peraturan yang dikeluarkan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan tujuan masing-masing individu agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai bersama sehingga dapat mendorong efisiensi dan pengembangan efektivitas dalam organisasi (Muyzenberg, 2014; Vu, 2018). Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mengikat baik umat maupun pengelola itu sendiri, misalnya ketika memasuki Vihara diharapkan untuk mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Selain itu, terdapat juga peraturan terkait larangan untuk makan dan minum di ruang *Dharmasala* (ruang pemujaan). Praktik ini merupakan wujud penghormatan terhadap peraturan yang telah disepakati bersama. Ketaatan terhadap peraturan juga menunjukkan kedisiplinan yang dapat membangun citra baik sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Buddha.

Eidetic reduction yang diabstraksi oleh peneliti adalah pengelola Vihara telah taat terhadap hukum yang berlaku. Ketaatan tersebut membuat Vihara mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah. Ketaatan akan hukum yang berlaku mem-

buat Vihara memperoleh dukungan dari pemerintah dalam setiap kegiatan yang diadakan. Pengelola Vihara senantiasa memperhatikan segala aktivitas yang dilaksanakan agar sejalan dengan hukum yang berlaku sehingga eksistensi Vihara dapat terjaga.

SIMPULAN

Akuntabilitas yang dipraktikkan oleh para aktor di Vihara sarat akan nilai *mettā* (cinta kasih) dan kepercayaan akan hukum karma. Akuntabilitas *mettā* dimaknai sebagai kepemimpinan dengan pendekatan hati. Wujud akuntabilitas *mettā* disalurkan melalui inovasi dalam melakukan pemberdayaan terhadap umat ataupun masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan tersebut berupa pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu, mendidik dan membesarkan anak asuh, serta melakukan kegiatan bakti sosial. Akuntabilitas *kamma* ditunjukkan dari kepercayaan pengelola dan umat akan hukum karma yang berkerja dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan akan hukum karma membuat pengelola berlaku transparan dan taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku agar dapat memperoleh kepercayaan dari umat. Akuntabilitas karma juga membuat pengelola bertindak dan mengambil keputusan lebih berhati-hati untuk menjaga moralitasnya. Praktik akuntabilitas *mettā* dan akuntabilitas karma merupakan bentuk kontrak sosial yang mengatur kehidupan sosial para aktor yang berperan dalam Vihara. Setiap aktor melaksanakan perannya masing-masing dengan dilandasi nilai *mettā* (cinta kasih) dan kepercayaan akan hukum karma sehingga dapat menciptakan harmoni dalam organisasi.

Penelitian ini masih terdapat sejumlah kekurangan, di antaranya yaitu informan dalam penelitian ini seluruhnya hanya merupakan aktor pengelola Vihara, sementara informan yang bersumber dari masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan tidak dilibatkan. Hal tersebut kemungkinan akan berdampak pada kurang mendalamnya data yang diperoleh dalam penelitian ini. Manfaat kajian ini adalah dapat membantu Vihara dalam meningkatkan kinerja pengelolaannya sehingga dapat mempertahankan loyalitas umat. Manfaat berikutnya adalah dapat menjadi sumber referensi baru bagi peneliti lain dalam penggunaan fenomenologi sebagai metodologi penelitian.

Studi ini mengkaji makna akuntabilitas yang dipahami oleh pengelola Vihara dengan menggunakan paradigma interpretif yang dalam hal ini menggunakan fenomenologi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dengan lebih mendalam yang melibatkan informan yang lebih luas termasuk masyarakat dan pemerintah sebagai *stakeholder*. Selain itu, dapat juga menggunakan paradigma lain seperti paradigma kritis untuk dapat mengkritisi konsep akuntabilitas dalam perspektif aktor pengelola Vihara. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan paradigma etnografi untuk mengkaji akuntabilitas yang dimaknai oleh para aktor dalam Vihara dengan memadukan budaya lokal masyarakat setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Briando, B., & Purnomo, A. S. (2019). Etika Profetik bagi Pengelola Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 342-364. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10020>
- Brummans, B. H. J. M., Hwang, J. M., & Cheong, P. H. (2013). Mindful Authoring through Invocation: *Leaders' Constitution of a Spiritual Organization. Management Communication Quarterly*, 27(3), 346-372. <https://doi.org/10.1177/0893318913479176>
- Burley, M. (2014). Karma, Morality, and Evil. *Philosophy Compass*, 9(6), 415-430. <https://doi.org/10.1111/phc3.12138>
- Campergue, C. (2015). Gifts and the Selfless Work Ethic in Tibetan Buddhist Centres in France. *Religion Compass*, 9(11), 443-461. <https://doi.org/10.1111/rec3.12183>
- Chabrak, N., Haslam, J., & Oakes, H. (2019). What is Accounting? The "Being" and "Be-ings" of the Accounting Phenomenon and Its Critical Appreciation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(5), 1414-1436. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2017-3097>
- Constable, P., & Kuasirikun, N. (2018). Gifting, Exchange and Reciprocity in Thai Annual Reports: Towards a Buddhist Relational Theory of Thai Accounting Practice. *Critical Perspectives on Accounting*, 54, 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.08.002>
- Daniels, P. L. (2014). Practical Wisdom for Managing Sustainable Enterprises –

- Synthesizing Buddhism and Ecological Economics. *Journal of Management Development*, 33(8), 797-811. <https://doi.org/10.1108/JMD-09-2013-0121>
- Davis, B. W. (2014). Naturalness in Zen and Shin Buddhism: Before and Beyond Self- and Other-Power. *Contemporary Buddhism*, 15(2), 433-447. <https://doi.org/10.1080/14639947.2014.935258>
- Huang, D., Lu, D., & Luo, J. (2016). Corporate Innovation and Innovation Efficiency: Does Religion Matter? *Nankai Business Review International*, 7(2), 150-191. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2015-0024>
- Hyndman, N., & McConville, D. (2018). Trust and Accountability in UK Charities: Exploring the Virtuous Circle. *The British Accounting Review*, 50(2), 227-237. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.004>
- Kovács, G. (2014). The Theoretical Foundation of Buddhist Management Practices. *Journal of Management Development*, 33(8), 751-762. <https://doi.org/10.1108/JMD-09-2013-0120>
- Kovács, G. (2017). The Value-Orientations of Catholic and Buddhist Entrepreneurs. *International Journal of Social Economics*, 44(12), 2428-2449. <https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2016-0200>
- Kraisornsuthasinee, S. (2012). CSR through the Heart of the Bodhi Tree. *Social Responsibility Journal*, 8(2), 186-198. <https://doi.org/10.1108/17471111211234824>
- Lamberton, G. (2015). Accounting and Happiness. *Critical Perspectives on Accounting*, 29, 16-30. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.10.005>
- Lamprecht, C., & Guetterman, T. (2019). Mixed Methods in Accounting: A Field Based Analysis. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 921-938. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2018-0403>
- Lennerfors, T. T. (2015). A Buddhist Future for Capitalism? *Revising Buddhist Economics for the Era of Light Capitalism. Futures*, 68, 67-75. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.09.003>
- Montenegro, T. M. (2017). Religiosity and Corporate Financial Reporting: Evidence from a European Country. *Journal of Management, Spirituality and Religion*, 14(1), 48-80. <https://doi.org/10.1080/14766086.2016.1249395>
- Muyzenberg, L. V. D. (2014). The Contribution of Buddhist Wisdom to Management Development. *Journal of Management Development*, 33(8), 741-750. <https://doi.org/10.1108/JMD-10-2013-0128>
- O'Leary, S. (2017). Grassroots Accountability Promises in Rights-based Approaches to Development: The Role of Transformative Monitoring and Evaluation in NGOs. *Accounting, Organizations and Society*, 63, 21-41. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.06.002>
- Padmasiri, M. K. D. (2016). Buddhist Perspective for Organization Human Resource Development: Reference to the Maha Mangala Sutta. *Universal Journal of Management*, 4(7), 405-410. <https://doi.org/10.13189/ujm.2016.040705>
- Paranoan, N., & Totanan, C. (2018). Akuntabilitas Berbasis Karma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 13(2), 161-172. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p09>
- Rahman, A. B. A., Sahad, M. N., & Abdullah, S. (2013). The Concept of Right View in Buddhism from the Islamic Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 91, 72-77. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.403>
- Randa, F. (2019). *Model Akuntabilitas Organisasi Gereja: Pemaknaan dan Rekonstruksi Inkulturatif Nilai-Nilai Budaya Lokal*. Yogyakarta: Gunung Sopa.
- Randa, F., Triyuwono, I., Ludigdo, U., & Sukoharsono, E. G. (2011). Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual pada Organisasi Gereja Katolik yang Terinkulturasi Budaya Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 35-51. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7109>
- Rospitadewi, E., & Efferin, S. (2017). Mental Accounting dan Ilusi Kebahagiaan: Memahami Pikiran dan Implikasinya bagi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 18-34. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7037>
- Scherer, B., & Waistell, J. (2018). Incorporating Mindfulness: Questioning Capitalism. *Journal of Management, Spirituality & Religion*, 15(2), 123-140. <https://doi.org/10.1080/14766086.2017.1375424>
- Silva, J. B. A., Llewellyn, N., & Anderson-Gough, F. (2017). Oral-Aural Accounting and the Management of the Jesuit Corpus. *Accounting, Organizations and Society*, 59, 44-57. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.04.003>

- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>
- Swierczek, F. W., & Jousse, D. (2014). Adam Smith as Bodhisattva? A Metta Analysis of Global Leadership. *Journal of Management Development*, 33(8), 786–796. <https://doi.org/10.1108/JMD-09-2013-0118>
- Stirling, K. (2014). Buddhist Wisdom as a Path to a New Economic Enlightenment. *Journal of Management Development*, 33(8), 812–823. <https://doi.org/10.1108/JMD-10-2013-0127>
- Suman, S. (2016). The Diamond Cutter: The Buddha on Managing Your Business and Your Life. *Leadership & Organization Development Journal*, 37(8), 1238–1239. <https://doi.org/10.1108/LODJ-07-2016-0169>
- Sung, J.M. (2014). Capitalism as Religion and Religious Pluralism: An Approach from Liberation Theology. *Buddhist-Christian Studies* 34, 155–165. <https://doi.org/10.1353/bcs.2014.0018>
- Thupten, J. (2019). The Question of Mindfulness' Connection with Ethics and Compassion. *Current Opinion in Psychology*, 28, 71–75. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2018.10.016>
- Vu, M. (2018). Skilful Means – A Buddhist Approach to Social Responsibility. *Social Responsibility Journal*, 14(2), 321–335. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0084>
- Ziakas, V., & Boukas, N. (2014). Contextualizing Phenomenology in Event Management Research: Deciphering the Meaning of Event Experiences. *International Journal of Event and Festival Management*, 5(1), 56–73. <https://doi.org/10.1108/IJEFM-08-2012-0023>